

**PERAN PEMERINTAH DESA KOTO TIBUN KECAMATAN KAMPAR
KABUPATEN KAMPAR DALAM MENINGKATKAN POTENSI
PERIKANAN TAHUN 2011-2012**

Rostina Norma Fitri

Email : Rnfitri@gmail.com

Pembimbing : Drs. Raja Muhammad Amin, M.si

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau
Kampus bina widya jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-
Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

In Kampar Regency is the producer of aquaculture products with the highest ratings supported the existence of great potential in the development of superior commodities especially aquaculture sector. Approximately 90 percent of aquaculture production came from Riau Province Kampar it is not wrong if called Kampar is aquaculture Riau lives. Licensing fisheries management in Kampar District contained in Kampar District Regulation No. 28 of 2009 Concerning Licensing Services And Business Recommendations and / or activity of the Environment Division. Kampar was umpteen of county and city in Riau Province which has 2,112 hectares of fish ponds and rivers and reservoirs kerambah 410. Unfortunately the potential of fisheries, particularly aquaculture in Kampar Regency maximum untapped. These results indicate that there is an important role Tribun Koto Village Government in improving fisheries potential, namely through coordination with the Department of Fisheries, as well as factors that affect the miraculous is Factor Human Resources, Regulatory Factor (rules), Organizational Factors, Factors Administrative, Budget factor. This research was conducted in the District Fisheries Office and the Office of Rural Koto Kampar Tribun. The data used in this research is data Primary and secondary data. The technique of collecting data through in-depth interviews and documentation. This study used a qualitative descriptive method of data collection due informant interviews conducted with the depth of the informants related. So that the formulation of the problem in this case is how the role of village government Tribun Koto Kampar Kampar district in improving the potential of fisheries in 2011-2012 and pakah factors affecting the role of Village Government Tribun Koto Kampar Kampar district in improving the potential of fisheries in 2011-2012.

Keywords: Role, Potential, Fishing

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang Masalah

Potensi perikanan yang dimiliki merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan bangsa, sebagai tulang punggung pembangunan nasional. Pemanfaatan secara optimal diarahkan pada pendayagunaan sumber daya ikan dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil, meningkatkan penerimaan dari devisa negara, menyediakan perluasan dan kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing hasil perikanan serta menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan serta tata ruang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pelayanan Perizinan dan Rekomendasi Usaha dan/atau Kegiatan Bidang Lingkungan Hidup, bagian Kedua Rekomendasi Pasal 3 menyebutkan bahwa : badan lingkungan hidup memberikan rekomendasi layak lingkungan kepada instansi teknis di lingkungan pemerintah Kabupaten Kampar yang berwenang menerbitkan izin usaha/kegiatan yang mengeksplorasi sumber daya alam dan memanfaatkan lingkungan hidup yang di perkirakan menimbulkan dampak terhadap lingkungan meliputi usaha/kegiatan:

- a. Bidang pertanian
- b. Bidang perikanan
- c. Bidang kehutanan

- d. Bidang kesehatan
- e. Bidang perhubungan
- f. Bidang teknologi satelit
- g. Bidang perindustrian
- h. Bidang pekerjaan umum
- i. Bidang energi dan sumber daya mineral
- j. Bidang pariwisata
- k. Bidang pengembangan nuklir
- l. Bidang pengelolaan limbah
- m. Bidang rekayasa genetika

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 8 tahun 2002 tentang Izin Usaha Perikanan pasal 4 ayat 2 menyebutkan setiap usaha perikanan wajib memiliki IUP (izin usaha perikanan). Sedangkan menurut pasal 3 menyebutkan usaha perikanan terdiri atas:

- a. Izin usaha penangkapan ikan
- b. Izin usaha pembudidayaan ikan
- c. Izin usaha pengumpulan ikan
- d. Izin usaha pengangkutan ikan

Kabupaten Kampar, Riau, telah ditetapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai sentra ikan patin (*Pangasius nasutus*) di Indonesia dengan produksi 500.000 ton per tahun.

Kabupaten Kampar merupakan penghasil produk perikanan budidaya dengan peringkat tertinggi yang didukung adanya potensi yang besar dalam pengembangan komoditas unggulan terutama disektor perikanan budidaya. Sekitar 90 persen produksi perikanan budidaya Provinsi Riau berasal dari Kabupaten Kampar maka tidak salah jika disebut Kampar adalah nyawa perikanan budidaya Riau. Di Indonesia sendiri para pengusaha ikan salai menurut

pantauan dari Dinas Perikanan Kabupaten Kampar mencapai 1,5 sampai dengan 2 ton per bulannya ikan salai yang dijual ke Batam. Perizinan pengelolaan perikanan di Kabupaten Kampar terkandung dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Perizinan dan Rekomendasi Usaha dan/atau Kegiatan Bidang Lingkungan Hidup.

Potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Kampar melalui sungai kampar, waduk buatanya dan beberapa daerah yang tanahnya cocok untuk pengembangan budidaya air tawar maka kabupaten ini menjadi urat nadi bagi pengembangan budidaya air tawar Provinsi Riau telah dijadikan sebagai kabupaten minapolitan oleh ditjen perikanan budidaya. Kabupaten Kampar adalah sekian dari kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Riau yang memiliki 2.112 hektar kolam ikan dan 410 kerambah sungai dan waduk. Sayangnya potensi perikanan khususnya budidaya perikanan di Kabupaten Kampar belum tergarap maksimal. Potensi perikanan budidaya air tawar yang sangat besar. Berikut adalah tabel proyeksi kebutuhan benih dan pakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi ikan masyarakat dan industri olahan pada tahun 2010-2014.

Dinas Perikanan Kampar, kabupaten yang memiliki 12 kecamatan itu memiliki area potensial perikanan darat kurang lebih 14.000 hektare untuk kolam ikan dan 16.400 hektare keramba. Saat ini hanya terdapat 2.599 hektare kolam ikan dan 31,5 hektare keramba yang dikelola masyarakat

atau baru 1,9 persen dari alokasi potensi lahan yang ada. Pemerintah daerah telah berupaya dan memberikan perhatian penuh untuk pengembangan industri perikanan darat ini.

Di Kecamatan Kampar, hasil produksi pertahun dari 2011 mencapai, 4,944.000/ekor dan tahun 2012 mencapai 3,911.100/ekor dan di dominasi di Desa Koto Tibun. Meskipun jumlah itu sangat besar namun pemerintah sulit untuk memasarkan hasil produksinya tersebut. Berdasarkan hasil temuan dilapangan dapat diketahui yang menjadi permasalahan teknis perikanan di Desa Koto Tibun adalah :

1. Minimnya usaha diversifikasi produk (industri pengolahan) dan pemasaran khususnya di Desa Koto Tibun.
2. Tingginya harga pakan ikan pabrik yang harus dibeli oleh para petani ikan di Desa Koto Tibun. Hal ini dikarenakan tidak adanya dispensasi dari pemerintah mengenai harga pakan ikan yang saat ini disamakan dengan harga pasar.
3. Belum optimalnya pemanfaatan potensi lahan dan usaha budidaya perikanan di Desa Koto Tibun yang terdiri dari Kolam dan Kerambah dan saat ini petani ikan pada tahun 2012 berjumlah 30 orang.
4. Kurangnya ketersediaan benih yang berkualitas dalam jumlah yang cukup.
5. Terbatasnya sarana dan prasarana serta yang saat ini

masih menggunakan peralatan sederhana dan seadanya.

6. Keterbatasan modal para petani ikan di Desa Koto Tibun yang cenderung menggunakan dana secara pribadi.
7. Kurangnya pembinaan dan pelatihan budidaya Perikanan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar.

Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa adalah bagian integral dari pemerintah nasional, maka pembahasan tentang tugas dan fungsi pemerintah desa tidak terlepas dari tugas dan fungsi pemerintah nasional seperti yang telah diuraikan dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 pada pasal 127 tentang tugas pokok Kepala Desa yaitu :

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintah desa
- b. Pemberdayaan masyarakat
- c. Pelayanan masyarakat
- d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum

Pelaksanaan Pengawasan terhadap usaha bidang perikanan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Kampar dilapangan kurang terlaksana dengan baik. Pengawasan Pemerintah yang dilakukan oleh tim Pengawas belum terlaksana dengan baik di Kabupaten dan Keberhasilan pelaksanaan suatu pengawasan juga di pengaruhi oleh adanya partisipasi dari masyarakat yang ikut mendukung program-program Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar terhadap usaha Perikanan tersebut. Adapun yang menjadi faktor-faktor yang menghambat

pengawasan pemerintah terhadap usaha bidang perikanan ini dapat dilihat dari kendala sebagai berikut :

- a. Sebagian besar kawasan perikanan di Kabupaten Kampar belum di manfaatkan dengan baik karena pengawasan belum begitu efektif.
- b. Dari Dinas Perikanan Kurangnya personil pengawas yang diturunkan ke lapangan.
- c. Kurang maksimalnya biaya atau anggaran untuk biaya pengawasan terhadap usaha bidang perikanan.

Untuk itu walaupun di Kabupaten Kampar telah di lakukan Pengawasan oleh Pemerintah terhadap usaha perikanan, namun dilihat dari lapangan masih terdapat para pengusaha ikan di tiap-tiap Desa masih banyak yang belum di perhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar, khususnya di Kecamatan Kampar. Oleh sebab itu maka Pemerintah Kabupaten Kampar menghimbau para Kepala Desa untuk melaksanakan program pengembangan potensi perikanan. Hal ini dikarenakan setiap Desa di Kabupaten Kampar memiliki potensi perikanan yang hampir merata, sehingga apabila pengembangan itu dilakukan oleh Dinas Perikanan tidak akan berjalan efektif mengingat wilayah Kabupaten Kampar yang cukup luas.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa belum optimalnya pengelolaan perikanan di Kabupaten Kampar, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang ***“Peran Pemerintah Desa Koto Tibun Kecamatan Kampar Kabupaten***

Kampar dalam meningkatkan Potensi Perikanan Tahun 2011-2012.

b. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah Peran Pemerintah Desa Koto Tibun Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar dalam meningkatkan Potensi Perikanan Tahun 2011-2012?
2. Apakah faktor yang mempengaruhi Peran Pemerintah Desa Koto Tibun Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar dalam meningkatkan Potensi Perikanan Tahun 2011-2012?

c. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui Peran Pemerintah Desa Koto Tibun Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar dalam meningkatkan Potensi Perikanan Tahun 2011-2012.
 - b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi peran Pemerintah Desa Koto Tibun Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar dalam meningkatkan Potensi Perikanan Tahun 2011-2012.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Sebagai kontribusi ilmiah bagi banyak kalangan untuk bahan penelitian lebih lanjut pada penelitian yang tertarik meneliti

mengenai peran Pemerintah Desa Koto Tibun Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar dalam meningkatkan Potensi Perikanan Tahun 2011-2012.

- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan perbandingan bagi pihak-pihak yang ingin memperdalam kajian yang sama mengenai peran Pemerintah Desa Koto Tibun Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar dalam meningkatkan Potensi Perikanan Tahun 2011-2012 dan tentunya dari sudut pandang yang berbeda.

- c. Upaya menambah koleksi bacaan dan keputustakaan mengenai peran Pemerintah Desa Koto Tibun Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar dalam meningkatkan Potensi Perikanan Tahun 2011-2012

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan metode penelitian kualitatif, yaitu usaha mengumpulkan, menyusun dan menginterpretasikan data yang ada kemudian menganalisa data tersebut, menelitinya, menggambarkan dan menelaah secara lebih jelas dari berbagai faktor yang berkaitan dengan kondisi, situasi dan fenomena yang diselidiki (Lexi J. Meleong, 1991:30). Metode penelitian ini

tentunya bisa menggambarkan perjalanan suatu gagasan atau pemikiran yang terkait dalam masalah-masalah yang dibatasi dalam penelitian ini. Penelitian ini penulis lakukan di Desa Koto Tibun Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Adapun lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah tempat-tempat yang terkait dengan peningkatan potensi perikanan. Alasan mengapa memilih lokasi ini adalah, karena Desa Koto Tibun mempunyai potensi perikanan yang sangat potensial untuk dikembangkan sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengembangan potensi perikanan di Desa Koto Tibun. Untuk mendapatkan data dan informasi dilakukan dengan wawancara mendalam kepada aktor-aktor yang terlibat di dalam pemerintah desa. Informan dipilih berdasarkan penarikan sampel nonprobability yaitu dengan cara *purposive sampling* hanya orang-orang yang ahli dan mengerti tentang fenomena yang terjadi. Dalam *purposive sampling*, pertimbangan peneliti memegang peranan, bahkan menentukan dalam pengambilan sekumpulan obyek untuk diteliti. Jelas bahwa nilai penelitian yang diperoleh berdasarkan sampel ini tergantung pada peneliti yang memberi pertimbangan (Syarifudin Hidayat, 2002:131-132).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Otonomi daerah merupakan momentum penting untuk melakukan penataan secara menyeluruh terhadap pemerintah desa. Dimana desa yang

merupakan salah satu punggung perekonomian nasional yang menyimpan potensi besar dengan sumber alam yang mendukung, lahan kosong yang tersedia luas dan alam pedesaan yang masih bersih tetapi memiliki kesempatan yang terbatas dan dukungan dana yang masih minim dari pemerintah pusat/daerah membuat potensi desa tersebut terpendam begitu saja.

Pembangunan nasional yang multi dimensi secara pengelolaannya melibatkan segenap aparat pemerintah, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah bahkan sampai ditingkat desa. Komponen atau aparat dimaksud hendaknya memiliki kemampuan yang optimal dalam pelaksanaan tugasnya. Tepatlah kiranya jika wilayah desa menjadi sasaran penyelenggaraan aktifitas pemerintah dan pembangunan, mengingat pemerintah desa merupakan basis pemerintah terendah dalam struktur pemerintah Indonesia yang sangat menentukan bagi berhasilnya ikhtiar dalam Pembangunan nasional yang menyeluruh.

Mengingat kompleksnya aspek-aspek atau bidang yang hendak dibangun ditingkat pemerintah terendah tersebut, maka salah satu aspek yang terlebih dahulu perlu dibangun adalah peningkatan kemampuan aparat pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas-tugas administrasi pemerintah, disamping memperkuat partisipasi masyarakat dan kelembagaannya serta aspek-aspek lainnya.

Tabel. 3.1.
Jumlah Usaha Perikanan di
Kabupaten Kampar Tahun 2010-
2012

No	Uraian	Tahun		
		2010	2011	2012
1.	Budidaya Kolam	6.870	6.882	6.345
2.	Budidaya Keramba	6.120	6.321	7.024
3.	Pembenihan	98	138	133
4.	Penangkapan	828	831	2.887
5.	Pengolahan Pasca Panen	269	265	265
6.	Pembuatan Pakan Ikan	97	99	105
7.	Pemasaran	86	86	94
Jumlah		14.369	14.622	16.853

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Kampar 2012

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa Dengan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Kampar melalui sungai kampar, waduk buatannya dan beberapa daerah yang tanahnya cocok untuk pengembangan budidaya air tawar maka kabupaten ini menjadi urat nadi bagi pengembangan budidaya air tawar provinsi Riau dan kampar telah dijadikan sebagai kabupaten minapolitan oleh ditjen perikanan budidaya. Selain sungai kampar, kabupaten ini masih memiliki Sungai Siak yang memiliki hulu di sungai sungai Tapung Kanan dan Tapung Kiri serta Sungai Sebayang yang air sungainya masih belum tercemar dan

sangat bagus serta cocok untuk budidaya ikan air tawar seperti patin dan ikan nila.

Tabel. 3.2.
Jumlah Produksi dan Luas
Perikanan di Kabupaten Kampar
Tahun 2010-2012.

No	Uraian	Tahun		
		2010	2011	2012
1.	Jumlah Produksi Kolam (Ton)	14.135,15	18.291,37	20.977,00
2.	Jumlah Produksi Keramba (Ton)	9.015,46	10.218,99	18.295,00
3.	Luas Areal Budidaya Kolam (Ha)	700,03	708,08	808,02
4.	Luas Areal Budidaya Keramba (Unit)	7.150	6.793	8.414

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Kampar 2012

Melihat kondisi tersebut perlu suatu model penanganan dan pengelolaan sumber daya perikanan yang mampu mensinergikan antara kepentingan pembangunan ekonomi, lingkungan dan kelestarian sumber

daya baik untuk kemanfaatan generasi sekarang maupun yang akan datang terutama di era otonomi daerah (desentralisasi) yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah sektor otonom tersebut tanpa mengurangi kesejahteraan masyarakat sekitar maupun nasional. Antara perencanaan dan pengawasan mempunyai hubungan yang erat. Penetapan perencanaan dalam suatu kegiatan sangat penting, karena itu perencanaan merupakan pedoman bagi pencapaian tujuan dalam kegiatan tersebut, sedangkan pengawasan merupakan pengendalian dan evaluatif terhadap proses kegiatan yang akan direncanakan. Dengan demikian jelaslah bahwa tanpa adanya perencanaan maka pengawasan tidak mungkin dilaksanakan karena tidak ada pedoman untuk melakukan pengawasan itu. Sebaliknya perencanaan tanpa pengawasan akan berarti timbulnya penyimpangan-penyimpangan yang serius tanpa ada alat untuk mencegahnya. Adapun yang menjadi ukuran dan standar dari expectation, yaitu memberikan sosialisasi dan pembinaan. Adanya pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan yang diberikan oleh Dinas Perikanan sebanyak 6 kali dalam setahun pada pengusaha keramba ikan di Desa Tibun Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar mengenai cara membudidayakan ikan yang benar dan pemasaran hasil ikan. Kegiatan ini di biayai oleh anggaran dari pemerintah daerah Kabupaten Kampar.

Pelaksanaan pengawasan sebagai salah satu sasaran yaitu

melaksanakan tugasnya dalam memberikan informasi kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi dan pembinaan pengusaha ikan dan masyarakat mengenai pengawasan pemerintah terhadap usaha perikanan di Kabupaten Kampar, khususnya Desa Koto Tibun Kecamatan Kampar.

a. Peningkatan Kualitas Sumber Daya

Peningkatan kualitas sumber daya yang ada dapat diartikan sebagai suatu bentuk pemberian pemahaman terhadap masyarakat yang tidak tahu menjadi mengerti. Selain itu minimnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan, sedangkan pada prinsipnya mendapatkan hasil yang dapat dirasakan secara berkesinambungan, peningkatan sumberdaya seperti petani ikan yang secara tepat dapat mendukung pelaksanaan kegiatan pembinaan yang efektif

b. Monitoring

Petugas yang melakukan pengawasan dan menilai bagaimana hasil dari pembinaan dan sosialisasi yang mereka lakukan sebelumnya, setelah mereka melakukan pengecekan di lapangan, dan apabila terdapat suatu kesalahan yang di temukan oleh pengawas, maka para pengawas tersebut harus memberikan pengarahan atau pembinaan secara persuasif terhadap para pengusaha atau pembudidaya ikan tersebut. dan setelah itu baru pengawas dilapangan membuat laporan hasil dari kegiatan pengawasan. Melakukan tindakan koreksi jika hasil kegiatan berbeda dengan tujuan yang ditetapkan. Mengambil tindakan perbaikan melalui tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki kesalahan-

kesalahan yang terjadi agar pelaksanaan tugas tetap mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan dengan melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang terkait.

Para petugas yang turun kelapangan telah memberikan sosialisasi mengenai bagaimana mengembangkan dan meningkatkan produk dan hasil dari pengusaha ikan itu sendiri. Dinas Perikanan Kabupaten Kampar masih belum efektif melakukan tugas mereka di karenakan masih banyak nya para pengusaha ikan di waduk Desa Tibun belum mendapatkan bantuan berupa pakan ikan, materi dan pengetahuan yang memadai tentang usaha perikanan.

Pemerintah desa tugas dalam memaksimalkan pendapatan Desa. Karena saat ini Desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

1.1. Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Potensi Perikanan di Kabupaten Kampar

Peran pemerintah desa dalam mengembangkan potensi perikanan merupakan syarat mutlak dalam memajukan potensi perikanan yang dimiliki Desa Koto Tibun, hal ini dikarenakan dalam dasawarsa terakhir ini banyak negara berkembang menaruh perhatian yang khusus terhadap industri perikanan.

Hal ini jelas kelihatan dengan banyaknya program pengembangan perikanan di negara tersebut.

Penggalian potensi perikanan di Desa Koto Tibun saat ini telah dilaksanakan secara bertahap oleh pemerintah Desa Koto Tibun, banyaknya potensi yang dimiliki menjadi modal awal dalam menambah PADes dari sektor perikanan. Dengan demikian potensi yang dimiliki dapat di kembangkan sebagai aktivitas perekonomian dalam mengembangkan potensi perikanan Desa Koto Tibun menjadi sesuatu yang mudah untuk dapat menghasilkan PADes.

Implementasi pelimpahan kewewengan Pemerintah kabupaten ke pemerintah desa, peran Seorang kepala desa diharapkan bisa mempelajari berbagai peraturan perundang-undangan tentang desa dan perangkatnya, sehingga roda pemerintah desa dapat berjalan dengan baik. Untuk mempercepat pembangunan, kepala desa harus sering bermusyawarah dengan pihak berkompeten dalam masyarakat, agar warga bisa berpartisipasi aktif dalam pembangunan di desa tersebut. Agar dapat menjalankan tugas secara baik dan profesional, kepala desa perlu memahami tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) dan peraturan tentang pemerintah desa (Pemdes). Aturan dan Tupoksi tersebut sangat berperan dalam mewujudkan roda pemerintah desa yang kondusif dan lancar bersama perangkat desa lainnya untuk kesejahteraan masyarakat.

Hanya saja, potensi perikanan yang ada tersebut belum dikembangkan secara optimal. Pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan haruslah berazaskan

kelestarian disamping azas manfaat. Semakin tingginya intensitas pemanfaatan sumberdaya perikanan, semakin besar pula ancaman terhadap kelestariannya, maka semakin penting pula memelihara ketertiban pengelolaannya disamping itu dengan banyaknya Kolam sehingga sangat potensial untuk pengembangan budidaya perikanan.

1.2. Faktor-faktor penghambat pelaksanaan Pengawasan Pemerintah terhadap Usaha Bidang Perikanan di Desa Koto Tibun Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

Telah di ketahui sebelumnya bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat pengembangan potensi perikanan oleh Pemerintah Desa Tibun terhadap Usaha Bidang Perikanan di Kecamatan Kampar Tahun 2011- 2012. Mengenai faktor-faktor apa saja yang menghambat pengembangan Potensi perikanan di Desa Tibun adalah sebagai berikut:

1. Faktor Sumber Daya Manusia

Faktor terpenting dalam melaksanakan koordinasi adalah adanya sumber daya manusia. Untuk kelancaran suatu koordinasi dibutuhkan manusia yang produktif, serta kemampuan manusianya yang handal sebagai pengelola yang profesional dalam hal ini pihak-pihak yang terkait dalam melakukan pengelolaan perikanan.

Terkait bidang budidaya perikanan, baik menggunakan APBD Pelalawan maupun

bantuan APBN, Pemerintah Daerah melalui Dinas Perikanan telah memprogramkan pengembangan budidaya ikan berupa peningkatan sarana produksi bagi wirausaha perikanan. Setidaknya dalam program ini sebanyak 8 kelompok mendapatkan bantuan berupa bantuan pakan ikan dan benih ikan. Pemerintah menjadi salah satu dasar dalam mewujudkan perilaku dan tindakan aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat, yang kemudian menciptakan sumber daya manusia yang bagus di Desa Koto Tibun dalam mengelolah usaha perikanan. Untuk itu perlu dilakukan pembinaan dan pelatihan agar dalam pengembanagn itu, petani mampu melakukan pengelolaan secara optimal di Desa Koto Tibun.

2. Faktor Regulasi (aturan)

Di dalam menjalankan tugas dan menata kehidupan masyarakat sudah barang tentu adanya peraturan atau regulasi yang mampu mengatur dan menjadi pedoman, untuk itu hal yang terpenting apakah peraturan tersebut mampu menjawab dan memberikan manfaat yang baik bagi ruang lingkup yang diatur. Seharusnya ada aturan khusus yang menangani permasalahan perikanan. Karena ditakutkan Sewaktu-waktu perubahan akan terjadi disini peran dari regulasi yang di anggap sangat penting untuk senantiasa menjawab perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat.

Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah yakni Dinas Perikanan Kabupaten Kampar harus mengacu pada peraturan yang telah ditetapkan, kendala saat ini adalah belum terlaksananya.

3. Faktor Organisatoris

Dalam menjalankan pengelalan dan pengembangan potensi perikanan harus didukung penuh dengan seluruh aspek-aspek yang terkait didalamnya, jika salah satunya tidak berjalan sebagaimana mestinya akan berdampak pada seluruh proses pengawasan tersebut. Kerja sama yang baik bisa menjadikan Dinas Perikanan menjadi sebuah Organisasi yang bisa berjalan dengan baik dan lancar, disamping itu juga perlu adanya komunikasi yang baik, tanpa adanya kerjasama dan komunikasi yang baik, sebuah organisasi tidak akan bisa menjalankan visi dan misi yang telah ditetapkan.

4. Faktor Administratif

Administratif menjadi hal terpenting dalam melayani kebutuhan masyarakat kepada pemerintah, administratif berguna sebagai pendukung untuk memudahkan dan membantu mengatur semua kegiatan dalam mencapai suatu tujuan. Kendala yang terjadi dalam proses pengawasan ini adalah dalam hal pelayanan pengelolaan usaha perikanan di Desa Tibun Kecamatan Kampar. Administrasi hal yang menjadi ukuran keberhasilan dari sebuah regulasi, tetapi Dinas Perikanan

belum bisa efektif dalam melakukan administrasi karna terhambat keterbatasan pegawai yang professional, hal tersebutlah yang menghambat terlaksananya pengawasan terhadap usaha perikanan di Kabupaten Kampar. Untuk itu sekiranya aparat pemerintah mengevaluasi tugas-tugas yang telah dilaksanakan, apakah sudah sesuai dengan apa yang telah ditentukan atau yang telah terjadi kesalahan-kesalahan dalam proses pelayanan yang secepatnya ada tindakan tepat dalam menyelesaikan masalah tersebut.

5. Faktor Anggaran

Anggaran merupakan sesuatu yang berpengaruh dalam pelaksanaan pengelolaan perikanan di Desa Koto Tibun, karna pengelolaan bisa berjalan dengan baik apabila ada sumber dana untuk melaksanakan pengelolaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Koto Tibun Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Salah satu kelemahan yang bisa dilihat saat ini di Dinas Perikanan Kabupaten Kampar yaitu lemahnya para petugas menyusun anggaran dan memperjuangkan agar anggaran yang diusulkan di setujui oleh pemerintah daerah Kabupaten Kampar.

KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Budidaya ikan air tawar, khususnya jenis patin, di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, terlihat

semakin berkembang. Tidak terkecuali pada Desa Koto Tibun Kecamatan Kampar. Peran Pemerintah Desa Koto Tibun Sangatlah penting dalam menunjang keberhasilan pengembangan potensi perikanan di Kabupaten Kampar. Berikut ini adalah peran pemerintah Desa Koto tibun dalam menggali potensi perikanan di desa tibun :

1. Penggalan potensi perikanan di Desa Tibun saat ini telah dilaksanakan secara bertahap oleh pemerintah Desa Tibun, banyaknya potensi yang dimiliki menjadi modal awal dalam menambah PADes dari sektor perikanan.
2. Membina perekonomian desa, Dengan demikian potensi yang dimiliki dapat dikembangkan sebagai aktivitas perekonomian dalam mengemabngkan potensi perikanan Desa Tibun menjadi sesuatu yang mudah untuk dapat menghasilkan PADes.
3. Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif, hal ini diketahui dengan bimbingan dari Pemerintah Desa untuk menghimbau masyarakatnya untuk meningkatkan perikanan Desa Koto Tibun.

Akan tetapi terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pengelolaan potensi perikanan di desa koto Tibun antara lain:

- a. Faktor Sumber Daya Manusia
- b. Faktor Regulasi (aturan)
- c. Faktor Organisatoris
- d. Faktor Administratif
- e. Faktor Anggaran

b. Saran

Walaupun di Desa Koto Tibun Kecamatan Kampar telah dikembangkan potensi Perikananannya, akan tetapi upaya Pemerintah Desa Koto Tibun dalam mengembangkan usaha perikanan masih kurang optimal, hal ini dapat dilihat dari lapangan bahwa masih terdapat para pengusaha ikan yang belum di perhatikan oleh pemerintah Kabupaten Kampar khususnya di Desa Koto Tibun Kampar. Diharapkan agar semua instansi terkait baik itu dari Dinas Perikanan, Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar, serta Pemerintah Kecamatan, dan Pemerintah Desa Kota Tibun dan para pengusaha ikan, dan masyarakat Kabupaten Kampar agar lebih meningkatkan keinginan dalam membangun usaha perikanan yang maju sehingga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat Kabupaten Kampar.

Penulis mengharapkan usaha perikanan di Kabupaten Kampar tetap optimal dan terus berkembang sesuai dengan visi dan misi yang bertujuan untuk menjadikan Kabupaten Kampar sebagai pusat perikanan di Provinsi Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Agustino, Leo. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Anderson, James. (1960). *Public Policy Making, dikutip oleh Budi Winarno*. (2007). *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Basri, Yuswar Zainul dan Mulyadi Subri. 2005. *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik..* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ghafar, Affan. (2002). *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Hidayat, Syarifudin. (2002). *Metodelogi Penelitian*. Bandung: Mandar Maju.
- J. Meleong, Lexi. (1991 dan 2000). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Joyosuharto, Sunardi. (2001). *Dasar-dasar Manajemen Kepariwisata Alam*. Yogyakarta: Liberty.
- Latham, Earl. (1965). *The Group Basis of Politics*. New York: Octagon Books.
- Ndraha, Taliziduhu. (1991). *Dimensi-Dimensi Pemerintah desa*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Nurcholis, Hanif. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga
- Santosa, Pandji. (2008). *Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: Refika Aditama.
- Salam, Dharma S. (2004). *Manajemen Pemerintah Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Siagian, Sondang P, (1982). *Pengawasan Melekat di Lingkungan Pemerintah*. Jakarta : Erlangga.
- Subagyo, P. Joko. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudirwo, Daeng. (1991). *Pokok-Pokok Pemerintah Di Daerah dan Pemerintah Desa*. Bandung : Angkasa.
- Sujamto. (2003). *Beberapa Pengertian Dibidang Pengawasan*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Sukanto. (2002). *Perencanaan dan Pembangunan Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi.

Syafiie, Inu Kencana. (2007).
*Manajemen
Pemerintah*. Jakarta: Perca.

Tangkilisan, Hesel Nogi S. (2003).
*Kebijakan Publik Untuk
Pemimpin Berwawasan
Internasional*. Yogyakarta:
Balairung dan Co.

Widiyanti, Ninik dan
Y.W.Sunindhia. (1987).
*Kepala Daerah dan
Pengawasan dari Pusat*.
Jakarta: Bina Aksara.

Widjaja, H.A.W. (2003). *Pemerintah
Desa/Marga*. Jakarta: Raja
Grafindo Persada.

Widjaja, H.A.W. (2010). *Otonomi
Desa*. Jakarta: Raja Grafindo
Persada.

Peraturan Perundangan

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang No. 31 Tahun 2004
Tentang Perikanan

Nomor 45 Tahun 2009 Tentang
Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun
2004 Tentang Perikanan

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun
2005 Tentang Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar
Nomor 28 Tahun 2009
Tentang Pelayanan Perizinan
Dan Rekomendasi Usaha
Dan/Atau Kegiatan Bidang
Lingkungan Hidup.